

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Good Governance adalah suatu tata kelola pemerintahan yang baik yang harus diterapkan untuk mencapai sebuah kesuksesan dalam setiap organisasi, sehingga akan menimbulkan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan yang sudah ditentukan. Saat ini *good governance* sangat ramai diperbincangkan, karena *good governance* adalah instrumen untuk mengukur ada atau tidaknya pekerjaan yang mencakup transparansi, profesionalisme, partisipatif, efektif serta efisien dalam bekerja di dalam sebuah organisasi yang dipimpin oleh seorang atasan terhadap pegawai-pegawainya.

Makna dari *governance* pada dasarnya tidak diatur dalam undang-undang (UU). Tetapi dapat dimaknai bahwa *governance* adalah tata pemerintahan, penyelenggaraan negara, atau manajemen (pengelolaan) yang artinya kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. *Governance* itu sendiri memiliki unsur kata kerja lain yaitu *governing* yang berarti fungsi pemerintah bersama instansi lain (LSM, swasta, dan warga Negara) yang dilaksanakan secara seimbang dan partisipatif. Sedangkan *good governance* adalah tata pemerintahan yang baik

atau menjalankan fungsi pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (struktur, fungsi, manusia, aturan, dan lain-lain).

Selain pelaksanaan *good governance* harus ada juga latihan kepemimpinan yang harus dilaksanakan oleh sebuah organisasi sehingga pegawai-pegawai mempunyai jiwa patriotisme dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Pelaksanaan *good governance* sangat penting, tidak hanya disebuah organisasi, tetapi setiap lembaga yang melaksanakan administrasi dalam lingkup kecil sekalipun harus menerapkannya.

Good governance tidak hanya melatih kepemimpinan seseorang, tetapi juga melatih psikologis seseorang agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan tujuan organisasi dan didasari dengan tanggungjawab yang tinggi agar setiap pekerjaan itu berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menegetahui pelaksanaan *good governance* dalam sebuah organisasi, maka perlu dilakukannya penelitian ilmiah. Sehingga tidak ada keraguan dalam mengemukakan suatu pernyataan. Salah satu asas dalam penyelenggaraan negawa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah asas keterbukaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN). Keterbukaan dalam hal ini dimaknai sebagai wujud transparansi penyelenggaraan Negara terhadap masyarakat, khususnya terkait dengan informasi berkaitan dengan

pelaksanaan pemerintahan. Untuk menunjang asas keterbukaan tersebut, maka pada tanggal 3 april 2008 lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dalam rangka mewujudkan demokrasi bangsa di era reformasi. *Good governance* selalu berhubungan dengan suatu pekerjaan, terutama kualitas pekerjaan yang baik. Sehingga pekerjaan yang dilakukan harus optimal. Organisasi pemerintah diharapkan bisa memberikan kualitas pekerjaan dan mutu yang baik. Sehingga adanya prestasi kerja yang baik.

Untuk menuju ke prestasi kerja yang baik, maka harus adanya sesuatu yang harus dilakukan seperti mempunyai jiwa amanah, yaitu mempunyai integritas yang tinggi, bersikap jujur dan bisa mengmban tugas dengan baik, selain itu harus juga memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana cara untuk mengimplementasikannya, menunjukkan rasa ingin tahu, semangat berdedikasi serta berorientasi pada hasil, memahami resiko pekerjaan dan berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan hasil kerjanya serta tidak bergantung kepada orang lain, memiliki pola pikir dan cara pandang yang baik, taat pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama, menyadari dan mau memahami serta

memperhatikan kebutuhan dan kepentingan pihak lain, sehingga timbullah prestasi kerja seorang pegawai dalam setiap organisasi.

Prestasi kerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat, karena tercapainya organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang digerakkan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Dari adanya kinerja yang baik, maka harus adanya kualitas pekerjaan yang baik.

Prestasi kerja pegawai dapat diukur dengan cara menilai prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja merupakan salah satu proses yang dilakukan instansi pemerintah atau perusahaan dalam mengevaluasi kemampuan kinerja pegawai. Penilaian ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana perkembangan kualitas kerja pegawai. Hasil penilaian prestasi kerja pegawai dapat diketahui kelebihan dan kekuarangan dari pekerjaan yang nilai serta dapat memberikan umpan balik kepada pegawai yang bersangkutan.

Untuk itu, tentunya dibutuhkan sistem penilaian prestasi kerja yang jelas dan objektif yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menilai prestasi kerja secara adil. Karena penilaian terhadap pegawai secara objektif dan adil akan mendorong produktivitas yang lebih baik. Prestasi kerja sangat erat hubungannya dengan produktivitas kerja para pegawai. Oleh karena itu, penilaian prestasi kerja secara rutin dilakukan agar diketahui peran yang aktif para pegawai dalam mendukung terciptanya tujuan organisasi.

Peneliti dalam hal ini mengambil data, melakukan observasi wawancara, di kantor Kecamatan Lengkong Kota Bandung. Peneliti sudah melakukan penjajagan sehingga, hasil penjajagan peneliti menemukan bahwa masih rendahnya prestasi kerja pegawai. Ini diperkirakan karena masih belum melaksanakan prinsip *good governance* yang tepat. Salah satu diantaranya yaitu belum melaksanakan prinsip keefektifan kerja pegawai. Terlihat dari hasil survey peneliti Kecamatan Lengkong merumuskan misi mewujudkan pelayanan prima dan mewujudkan kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan Lengkong yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dari keempat tersebut bawah Kecamatan Lengkong melaksakan sebagian dari prinsip *good governance*, akan tetapi masih banyak pegawai yang melenceng dari pekerjaannya, belum terlihat efektif dan efisien, sehingga prestasi kerja pegawai di kantor Kecamatan Lengkong masih rendah. Terlihat bahwa prestasi kerja pegawainya masih kurang, sehingga harus adanya

peningkatkan kualitas pekerjaan agar menimbulkan prestasi kerja pegawai yang baik. Khususnya untuk *good governance* sendiri yang harus lebih optimal dilaksanakan sehingga berkembangnya suatu organisasi. Dari yang sudah dijelaskan di atas, bahwa peneliti tertarik untuk mengangkat masalah yang akan diteliti dengan judul :

“PENGARUH PELAKSANAAN *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN LENGKONG KOTA BANDUNG”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, bahwa peneliti mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

- 1.1.1 Berapa besar pengaruh pelaksanaan *good governance* terhadap prestasi kerja pegawai di kantor Kecamatan Lengkong Kota Bandung?
- 1.1.2 Apa yang menjadi kendala terwujudnya pelaksanaan *good governance* terhadap prestasi kerja pegawai di kantor Kecamatan Lengkong Kota Bandung?
- 1.1.3 Usaha apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan *good governance* terhadap prestasi kerja pegawai di kantor Kecamatan Lengkong Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka peneliti mengemukakan tujuan penelitian sebagai berikut :

- 1.1.1 Untuk mengetahui berapa besar pengaruh dari adanya pelaksanaan *good governance* terhadap prestasi kerja pegawai di kantor Kecamatan Lengkong Kota Bandung.
- 1.1.2 Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang ada dalam pelaksanaan *good governance* terhadap prestasi kerja pegawai di kantor Kecamatan Lengkong Kota Bandung.
- 1.1.3 Untuk mengetahui usaha untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan *good governance* terhadap prestasi kerja pegawai di kantor Kecamatan Lengkong Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari apa yang sudah dipaparkan sebelumnya, peneliti mengemukakan adanya kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut :

- 1.1.1 Kegunaan Teoritis, untuk dapat lebih mengetahui dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan *good governance* tersebut terhadap prestasi kerja pegawai, dan mengerti bagaimana mengimplementasikan *good governance* serta untuk pengembangan ilmu ke depannya.

1.1.2 Kegunaan Praktis, yaitu Kecamatan bisa untuk menemukan solusi dalam permasalahan pelaksanaan *good governance* terhadap prestasi kerja pegawai serta lebih mengetahui usaha apa yang dilakukan dalam *good governance* tersebut sehingga bisa untuk diaplikasikan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah sebagian konsep, definisi dan konstruksi definisi dan proposisi yang menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan merumuskan konsep. Kerangka terori merupakan landasan pemikiran untuk melaksanakan penelitian dan teori digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial yang menjadi objek penelitian (**Singarimbun, 1995:73**).

Berdasarkan rumusan di atas, maka peneliti akan mengemukakan beberapa teori pendapat, atau gagasan yang akan dijadikan sebagai titik tolak atau landasan berfikir dalam penelitian ini.

1.1.1 Good Governance

Istilah *good governance* berasal dari induk bahasa Eropa Latin, yaitu *gubernare* yang diserap oleh bahasa Inggris menjadi *govern*, yang berarti *steer* (menyetir, mengendalikan), *direct* (mengarahkan), atau *rule*

(memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa Inggris adalah *to rule with authority*, atau memerintah dengan kewenangan.

Pengertian *good governance* menurut **(Mardiasmo, 1999:18)** adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik.

Berdasarkan pengertian *good governance* oleh **Mardiasmo** sejalan dengan tuntutan reformasi yang berkaitan dengan Aparatur Negara termasuk daerah adalah perlunya mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maka menuntut penggunaan konsep *good governance* sebagai pemerintahan yang baik relevan dan berhubungan satu dengan lainnya. Selain itu Bank Dunia juga mensinonimkan *good governance* sebagai hubungan sinergis dan konstruktif di antara Negara, sektor dan masyarakat **(Effendi, 1996:47)**.

Prinsip dasar yang melandasi perbedaan antara konsepsi pemerintahan (*governance*) dengan pola pemerintahan yang tradisional, adalah terletak pada adanya tuntutan yang demikian kuat agar peranan pemerintah dikurangi dan peranan masyarakat (termasuk dunia usaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat/ organisasi non pemerintah) semakin ditingkatkan dan semakin terbuka aksesnya.

Dalam Sistem Administrasi Negara Indonesia pelaksanaan *good governance* seperti dalam pengertian yang dikembangkan oleh UNDP. Berdasarkan Dokumen Kebijakan UNDP dalam “Tata Pemerintahan Menunjang Pembanguna Manusia Berkelanjutan”, Januari 1997, yang dikutip dari bulletin informasi Prgoram Kemitraan unutk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia (*Partneship for Governance Reform in Indonesia*), 2000, disebutkan : Tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga di warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum.

Sesuai dengan yang sudah dijalankan oleh Kecamatan Lengkong, bahwa mereka sudah melaksanakan empat (4) dari prinsip *good governance*. Di antaranya yaitu efektif, efisien, transparan, dan akuntabilitas. Dari empat pinsip tersebut, **Sedarmayanti (2012:7) dalam bukunya *Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik”*** mengatakan bahwa :

- a. Efektif adalah setiap proses dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan

melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia.

- b. Efisien adalah suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya.
- c. Transparan adalah pemerintahan yang baik yang bersifat transparan atau terbuka terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah.
- d. Akuntabilitas adalah kewajiban bagi aparaturnya pemerintah untuk bertindak selaku penanggungjawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan.

1.1.2 Prestasi Kerja

Prestasi kerja seorang pegawai adalah hal yang sangat penting artinya bagi suksesnya sebuah instansi/organisasi/manajemen, karena manusia sebagai salah satu faktor produksi yang merupakan basis atau penggerak atas faktor-faktor yang lain harus dapat dirangkum menjadi satu kesatuan di dalam melaksanakan proses produksi pada instansi/organisasi dengan cara yang paling efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan profit.

Pendapat dari **Drs. Supardi : dalam bukunya (Supardi, Manajemen Prsonalia, Edisi 1, BPFE Yogyakarta, 1989, hal 63)** “ Prestasi Kerja adalah kegiatan dan hasil kerja yang dicapai atau ditunjukkan oleh seseorang di

dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. Dapat dikatakan pula bahwa prestasi kerja merupakan perwujudan atau penampilan dalam melaksanakan pekerjaan”.

Untuk mengukur tinggi atau rendahnya prestasi kerja seseorang perlu dilakukan penelitaian prestasi kerja menurut :

Mangkunegara (2009 : 67 – 69) menyatakan bahwa : “Unsur-unsur yang dinilai dari prestasi kerja di antaranya adalah :

- 1.a Kualitas Kerja yang terdiri dari ketepatan, ketelitian, keterampilan, dan kebersihan.
- 2.a Kuantitas kerja yang terdiri dari output dan penyelesaian kerja dengan ekstra.
- 3.a Keandalan yang terdiri dari mengikuti instruksi, inisiatif, kehati-hatian, kerajinan.
- 4.a Sikap yang terdiri dari sikap terhadap perusahaan, karyawan lain, dan pekerjaan sesama.

Dari yang sudah dipaparkan di atas sebelumnya, bahwa prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang di dalam sebuah organisasi atau instansi dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

1.6 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiono, “Metode Penelitian Manajemen” 2013 : 134). Bertitik tolak dari kerangka pemikiran di atas, bahwa peneliti mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

- 1.1.1 Ada pengaruh yang signifikan antara *good governance* terhadap prestasi kerja pegawai di kantor Kecamatan Lengkong Kota Bandung.
- 1.1.2 Terdapat hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan *good governance* terhadap prestasi kerja pegawai di kantor Kecamatan Lengkong Kota Bandung.
- 1.1.3 Adanya usaha untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan *good governance* terhadap prestasi kerja pegawai di kantor Kecamatan Lengkong Kota Bandung.

Berdasarkan hipotesis di atas, peneliti mengemukakan definisi operasional sebagai berikut :

Hipotesis Statistiknya :

- 1.1.1 Pengaruh yaitu menunjukkan seberapa besar pengaruh pelaksanaan *good governance* terhadap prestasi kerja pegawai di kantor Kecamatan Lengkong Kota Bandung.

- 1.1.2 *Good governance* adalah suatu tata kelola pemerintahan yang baik, dimana seseorang Camat memberikan sikap kepemimpinan yang baik terhadap pegawai-pegawai kantor Kecamatan Lengkong Kota Bandung.
- 1.1.3 Prestasi kerja adalah hasil kerja seseorang atas tugas yang sudah diemban masing-masing yang diberikan kepada pegawai-pegawai di kantor Kecamatan Lengkong Kota Bandung.

$$H_0: \rho_s = 0$$

$$H_1: \rho_s \neq 0$$

- 1.1.1 $H_0: \rho_s = 0$: *Good Governance* : Prestasi Kerja = 0, *Good Governance* (X) Prestasi Kerja (Y) artinya pelaksanaan *good governance* terhadap prestasi kerja tidak ada pengaruh yang signifikan.
- 1.1.2 $H_1: \rho_s \neq 0$: *Good Governance* : Prestasi Kerja = 0, *Good Governance* (X) Prestasi Kerja (Y) artinya pelaksanaan *good governance* terhadap prestasi kerja ada pengaruh yang signifikan.

1.7 Lokasi dan Lamanya Penelitian

1.1.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu di kantor Kecamatan Lengkong Kota Bandung yang bertempat di Jl. Talaga Bodas No. 35 Burangrang Bandung, Tlp 022-7310219, Indonesia.

1.1.2 Lamanya penelitian

Dalam melakukan penelitian, lamanya rencana penelitian yaitu kurun waktu satu (1) semester atau enam (6) bulan.